



RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG
2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Renja PD dengan mengacu kepada Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2018 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Juni 2017

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 198603 1 006**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok	5
1.3 Landasan Hukum	8
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI KINERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ DISYANJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyanjak Kota Bandung	27
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyanjak Kota Bandung	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018	45
a. Tujuan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	45
b. Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	46
3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2018	48

3.3	Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018	49
BAB IV	PENUTUP	55



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.2	Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung	5
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016	21
2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung Tahun 2016	24
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung	32
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016	41
3.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	48
3.2	Proyeksi Target Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018	49
3.3	Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018	51
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi, maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang dimana perencanaan mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi serta dalam proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang akhirnya pada pencapaian hasil tidak hanya bagi organisasi dan juga lingkungan di sekitarnya yang diselaraskan dengan perencanaan strategis selama lima tahun kedepan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung mempunyai tugas pokok sebagai pengelola pendapatan asli daerah, yang mendukung terhadap visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, menghasilkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dokumen rencana tahunan Kerja Perangkat Daerah atau Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Badan untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018;
 3. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun kelima atau terakhir dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Berdasarkan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018 (perubahan SOTK menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Januari 2018) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang

dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

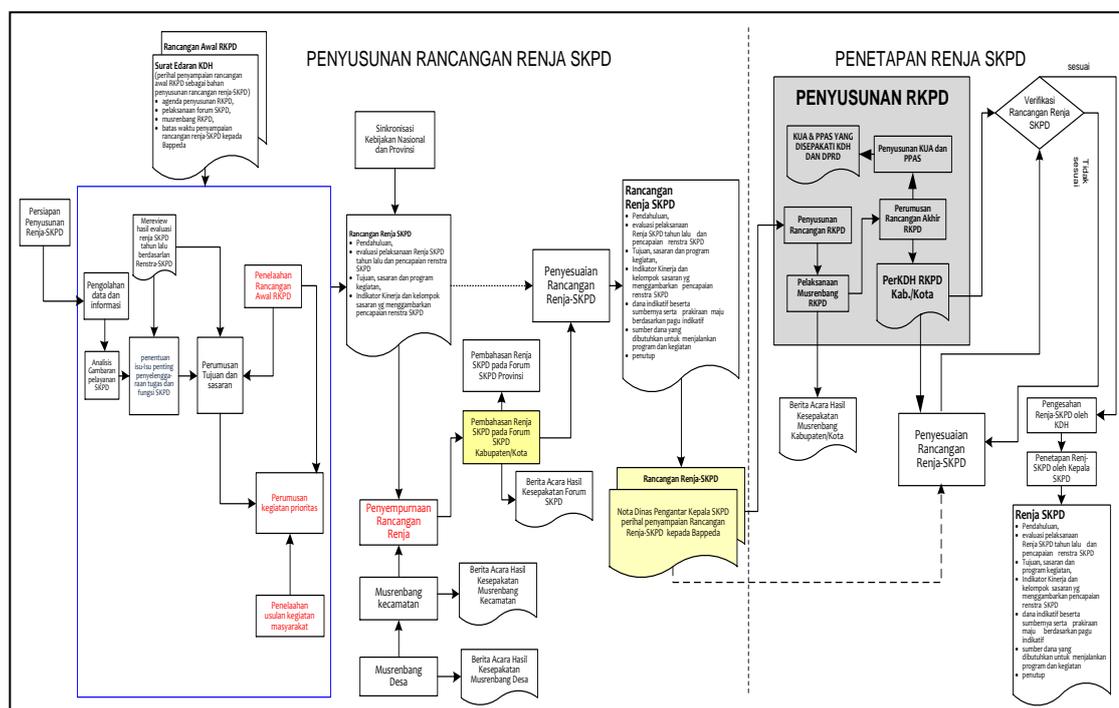
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam membuat Renja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Proses penyusunan Renja Badan terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Badan, orientasi mengenai RKPD dan Renja Badan, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Badan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Badan yang definitif.

Proses penyusunan rancangan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pelayanan Pajak/ BPPD Kota Bandung tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pelayanan Pajak/ BPPD Kota Bandung. Tahap penetapan rancangan akhir rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah,

selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung menetapkan Renja Badan untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan pada tahun anggaran berkenaan.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar. 1.1.
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



Untuk membuat dokumen Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung ini diperlukan waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan mulai dari musrenbang, penyusunan RKPD Badan sampai dengan tersusunnya dokumen Renja, sedangkan agenda kerja



penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung seperti pada tabel 1.2. dibawah ini :

TABEL 1.2.

Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung

NO	Kegiatan	Bulan Feb				Bulan Maret				Bulan April				Bulan Mei				Bulan Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1.	HASIL MUSRENBANG KOTA SEBAGAI BAHAN RKPD																		
2.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA HASIL RKPD																				
3.	PENGUMPULAN DATA DILANJUTKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA																				
4.	PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN																				
5.	VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENETAPANNYA																				

1.2. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula nomenklatur Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang disingkat BPPD Kota Bandung. Sedangkan yang menjadi landasan hukum tentang uraian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Adapun Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menurut Perwal tersebut adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tanggal 18 November 2016 terdiri dari:

a. **Kepala Badan**

b. **Sekretariat**, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

c. **Bidang Perencanaan dan Penyuluhan**, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah;
2. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi;
3. Sub Bidang Survey dan Data Wajib Pajak.

d. **Bidang Pendapatan Asli Daerah 1**, membawahkan:

1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
2. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
3. Sub Bidang BPHTB dan PPJ.

e. **Bidang Pendapatan Asli Daerah 2**, membawahkan:

1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
3. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan.

f. **Bidang Pengendalian**, membawahkan:

1. Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan;
2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan;
3. Sub Bidang Penindakan.

g. **UPT**;

h. **Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**.

1.3. Landasan Hukum

Perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait perencanaan pembangunan.

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
- 17) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 18) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota

- Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
- 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 - 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,).
 - 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
 - 24) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
 - 25) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 609 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;

- 26) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dalam lima tahun (Renstra) dan rencana kerja setiap satu tahun sekali (Renja).
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan, proses penyusunan Renja Badan, keterkaitan antara Renja Badan dengan dokumen RKPD, Renstra Badan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RKA dan DPA Badan.

1.2. Tugas Pokok

Menjelaskan Tugas Pokok Badan berdasarkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota.

1.3. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan, serta susunan garis besar isi

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu;

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada RKA dan DPA Dinas tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berisi kajian terhadap capaian kinerja Badan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Badan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja Badan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan
5. Formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Reviu Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dengan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah :

1. Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah;

2. Terciptanya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak;
3. Meningkatnya Proporsi Pendapatan Asli Daerah bukan Pajak Daerah terhadap PAD;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pajak Daerah.

3.2 Target Pajak Daerah 2018

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Besaran anggaran yang dibutuhkan.

BAB IV : PENUTUP

Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ingin dicapai dari rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan Regulasi Pajak Daerah;
2. Optimalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT);
3. Penyempurnaan Informasi Teknologi (IT) Pajak Online;

4. Intensifikasi pemeriksaan, pengawasan dan penindakan;
5. Penyempurnaan data base wajib pajak;
6. Perubahan SOTK Badan;
7. Peningkatan Kapasitas SDM;
8. Peningkatan sarana dan prasarana.

BAB II

EVALUASI KINERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ DISYANJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Perubahan nomenklatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dimana adanya perubahan nomenklatur Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung disingkat BPPD dan Unit Pelayanan Pemungutan (UPP) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPT Bandung Tengah, UPT Bandung Utara, UPT Bandung Barat, UPT Bandung Timur, UPT Bandung Selatan.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Badan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan **Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung** adalah menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

Pada Tahun 2017 selaras dengan perubahan nomenklatur Badan dan uraian tugas pokok dan fungsi yang dituangkan di dalam Reviu Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mewujudkan Visi yaitu : **“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Profesional dan Akuntabel”**, sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan program kegiatan pada tahun selanjutnya yang diawali pada tahun 2014 sebagai tahun pertama dari bagian Renstra 2014-2018.

Tahun 2016 Program kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung meliputi 10 (sepuluh) program yaitu:

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- (9) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah;
- (10) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi efisiensi di semua program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung/ Disyajak Kota Bandung, disebabkan adanya rasionalisasi dan asistensi secara terukur dan terarah dengan dilakukannya perbaikan serta penyempurnaan secara teknis dan administrasi yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan, seperti pergeseran program kegiatan, sehingga dapat terserap dan dilaksanakan pada program yang baru. Dengan menjalankan asistensi dan rasionalisasi melalui penyusunan rencana anggaran kas yang terperinci tersebut maka program dan kegiatan tidak mengalami hambatan sehingga bisa dijalankan/dilaksanakan penjadwalan pelaksanaan terhadap masing-masing kegiatan, adapun program kegiatan di tahun 2016 tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	KELUARAN / OUTPUT	KENDALA/ PERMASALAHAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,891,249,656.00	10,207,386,384.00	93.72%		
1	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	240,000,000.00	185,795,144.00	77.41%	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	efisiensi karena fluktuasi harga pasar
2	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	102,500,000.00	66,146,000.00	64.53%	Tersedianya Garasi untuk Bis Layanan BPPD Kota Bandung	Diperubahan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Aplikasi Barcode Barang Inventaris tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu
3	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1,827,140,000.00	1,617,758,700.00	88.54%	Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK untuk 3 Bis layanan, 27 roda empat, 135 roda dua	adanya penurunan harga BBM dan kondisi kendaraan dinas rata-rata dalam keadaan baik sehingga penggantian suku cadang dan service berkurang
4	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	742,228,630.00	737,892,380.00	99.42%	Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak	Efisiensi Pengadaan
5	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	224,000,000.00	220,770,400.00	98.56%	Tersedianya ATK Disyajak	efisiensi pengadaan
6	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	355,600,000.00	347,313,700.00	97.67%	Tersedianya cetakan sebagai sarana administrasi	efisiensi pengadaan/lelang
7	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	279,300,000.00	274,554,570.00	98.30%	Tersedianya instalasi listrik dan Peralatan Listrik Kantor Disyajak	Efisiensi Pengadaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	KELUARAN / OUTPUT	KENDALA/ PERMASALAHAN
8	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	5,380,358,926.00	5,262,944,070.00	97.82%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Efisiensi Pengadaan
9	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	452,700,000.00	439,087,250.00	96.99%	Tersedianya peralatan rumah tangga Disyajak	Efisiensi Pengadaan
10	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	170,500,000.00	160,392,500.00	94.07%	Tersedianya bahan bacaan Disyajak	Efisiensi dan selektif dalam pemilihan bahan bacaan
11	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	185,002,100.00	176,582,450.00	95.45%	Tersedianya makanan dan minuman di gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat	Efisiensi sesuai kebutuhan
12	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	650,000,000.00	481,068,430.00	74.01%	Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyajak dengan instalasi lain	Efisiensi sesuai kebutuhan
13	<i>Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</i>	281,920,000.00	237,080,790.00	84.10%	Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyajak	Efisiensi sesuai kebutuhan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,575,350,000.00	1,502,297,990.00	95.36%		
14	<i>Pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	300,000,000.00	282,900,000.00	94.30%	Lancarnya operasional Disyajak dengan penambahan 10 kendaraan roda dua	Efisiensi Pengadaan
15	<i>Pengadaan mebeleur</i>	75,000,000.00	48,950,000.00	65.27%	Tersedianya meubelair sebagai penunjang kelancaran pelayanan administrasi	Di perubahan Pengadaan Dinding sekat kayu tidak diserap karena keterbatasan waktu
16	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	926,350,000.00	903,994,950.00	97.59%	Terpeliharanya Gedung Disyajak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyajak	Efisiensi pengadaan
17	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	199,000,000.00	195,104,040.00	98.04%	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Efisiensi Pengadaan
18	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i>	75,000,000.00	71,349,000.00	95.13%	Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyajak dan Kantor UPP	Efisiensi Pengadaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	KELUARAN / OUTPUT	KENDALA/ PERMASALAHAN
III	Program peningkatan disiplin aparatur	538,200,000.00	527,706,500.00	98.05%		
19	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	538,200,000.00	527,706,500.00	98.05%	Tersedianya pakaian pegawai dan atributnya	Efisiensi pengadaan
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,456,700,000.00	873,004,160.00	59.93%		
20	<i>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</i>	171,900,000.00	137,673,000.00	80.09%	Tersosialisasikannya peraturan perundangan pajak daerah	Efisiensi sesuai dengan kebutuhan
21	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	1,284,800,000.00	735,331,160.00	57.23%	Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter	Dikarenakan Disyajak melaksanakan diklat ke STAN, tetapi STAN tersebut untuk tahun 2016 ini tidak melaksanakan diklat karena perubahan SOTK
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	156,800,000.00	147,568,057.00	94.11%		
22	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	156,800,000.00	147,568,057.00	94.11%	Tersusunnya LAKIP Disyajak 2015	Efisiensi pengadaan
VI	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,747,118,900.00	2,549,642,913.00	92.81%		
23	<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</i>	534,800,000.00	521,366,370.00	97.49%	Terlaksananya kajian tentang sistem penomoran NPWPD	Efisiensi sesuai kebutuhan
24	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan</i>	1,008,700,000.00	968,047,509.00	95.97%	Terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Efisiensi pengadaan/ lelang & tidak kesesuaian dengan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	KELUARAN / OUTPUT	KENDALA/ PERMASALAHAN
						perencanaan
25	<i>Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran</i>	485,000,000.00	443,774,649.00	91.50%	Terselesaikannya penyajian data piutang pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak parkir dan pajak BPHTB	Terdapat penganggaran untuk proses penghapusan piutang pajak pendaftaran yang tidak dapat direalisasikan karena masih menunggu ditetapkannya Raperwal ttg penghapusan piutang Retribusi dan pajak daerah
26	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah</i>	718,618,900.00	616,454,385.00	85.78%	Jasa konsultasi penyusunan background paper dan draft penyempurnaan perwal tentang Nilai Sewa Reklame Tidak diserap sehubungan dengan raperda tentang perubahan atas perda kota bdg no. 04 tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame (belum diundangkan/dalam proses pembahasan dengan pansus DPRD)	
VII	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	150,400,000.00	147,127,050.00	97.82%		
27	<i>Penyusunan Renstra dan Renja SKPD</i>	150,400,000.00	147,127,050.00	97.82%	Tersusunnya dokumen renja 2017	Efisiensi Pengadaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	KELUARAN / OUTPUT	KENDALA/ PERMASALAHAN
VIII	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	25,000,000.00	0	0	-	
28	<i>Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS</i>	25,000,000.00	0	0	-	kegiatan ini diadakan karena di Disyajak banyak kasus kasus disiplin pegawai tetapi setelah mau direalisasikan untuk honorarium Ad Hoc payung hukumnya tidak jelas dan tidak ada satuan standar harga
IX	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	11,834,513,500.00	10,354,480,437.00	87.49%		
29	<i>Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya</i>	307,175,000.00	260,076,051.00	84.67%	Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah	Efisiensi pengadaan & tidak kesesuaian dengan perencanaan
30	<i>Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan</i>	4,918,500,000.00	3,870,070,100.00	78.68%	Tersusunnya kajian NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan	Efisiensi sesuai kebutuhan
31	<i>Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah</i>	2,577,900,000.00	2,516,496,490.00	97.62%	Meningkatnya pemahaman para wajib pajak tentang pembayaran pajak	Efisiensi pengadaan & tidak kesesuaian dengan perencanaan
32	<i>Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak</i>	127,950,000.00	116,295,017.00	90.89%	Terlaksananya survey kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	Efisiensi sesuai kebutuhan
33	<i>Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan</i>	710,200,000.00	630,988,951.00	88.85%	Terlaksananya pemeriksaan terhadap wajib pajak	Efisiensi sesuai kebutuhan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	KELUARAN / OUTPUT	KENDALA/ PERMASALAHAN
	<i>Pajak</i>					
34	<i>Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah</i>	237,000,000.00	230,821,997.00	97.39%	Jumlah kajian metode perhitungan potensi pajak daerah dan pengembangan aplikasi pengelolaan data dan potensi pajak daerah	Efisiensi sesuai kebutuhan
35	<i>Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah</i>	206,063,500.00	200,050,747.00	97.08%	Jumlah aplikasi masterplan visualisasi data pajak daerah yang terintegrasi dalam tabulasi, grafik, peta dan data potensi lainnya	Efisiensi sesuai kebutuhan
36	<i>Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah</i>	2,242,405,000.00	2,119,553,030.00	94.52%	Jumlah aplikasi kebijakan komunikasi dan informasi pajak daerah	Efisiensi sesuai kebutuhan
37	<i>Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah</i>	147,450,000.00	94,006,694.00	63.75%	Jumlah wajib pajak terperiksa	Efisiensi sesuai kebutuhan
38	<i>Analisa data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran</i>	359,870,000.00	316,121,360.00	87.84%	Jumlah rekapan laporan VOP pajak pendaftaran	Efisiensi sesuai kebutuhan
X	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	0	0	0		
39	<i>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah</i>	0	0	0	-	Di drof

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung

Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja sesuai dengan Reviu Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2016, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 di bawah ini.

Tabel 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ DISYANJAK
KOTA BANDUNG
TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2016	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah Penerimaan pajak daerah :	Rp.	2.186.416.770.000	1.711.417.478.077	78,27%
	1. Pajak Hotel		260.000.000.000	274.809.381.603	105,70%
	2. Pajak Restoran		235.000.000.000	241.788.513.937	102,89%
	3. Pajak Hiburan		68.000.000.000	69.831.106.484	102,69%
	4. Pajak Parkir		26.000.000.000	29.289.132.387	112,65%
	5. Pajak BPHTB		660.000.000.000	440.329.093.979	66,72%
	6. PPJ		173.200.000.000	177.358.328.595	102,40%
	7. Pajak Reklame		316.716.770.000	25.653.533.922	8,10%
	8. Pajak Air Tanah		32.500.000.000	33.686.169.278	103,65%
	9. PBB		415.000.000.000	427.745.927.442	103,07%
2.	IKM bidang pelayanan pajak daerah.	Nilai	82	83,545	101,88%
Rata-rata Capaian IKU			86,50%		
Kinerja Capaian Sasaran			Tidak Tercapai		

Catatan: Data realisasi pendapatan Tahun 2016 merupakan data rekonsiliasi pendapatan pajak dengan DPKAD Kota Bandung sebelum pemeriksaan BPK.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung

Era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang Pajak Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi PD, dengan dilandasi oleh isu penting penyelenggaraan tugas dalam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Penentuan tarif dan pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN sehingga penetapan hasil target berdasarkan pelaporan penerimaan dari PT. PLN saja;

2. Tidak semua objek pajak PAT menggunakan meteran digital yang terintegrasi dengan penetapan NPA di BPLH;
3. Belum optimalnya sinergitas data antara disyajak dan BPLH, berkaitan dengan monitoring data yang dapat memudahkan dan mempercepat proses penetapan NPA menjadi SKPD, serta dapat mempercepat proses pembayaran oleh WP;
4. Pajak BPHTB merupakan penerimaan pajak hasil dari transaksi jual beli/transaksional properti yang dilakukan masyarakat yang tidak bisa diprediksi adanya transaksional;
5. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak;
6. Belum optimalnya layanan pajak daerah meliputi pemenuhan fasilitas atau sarana dan prasarana layanan pajak;
7. Belum optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan. Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT);
8. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan
9. Belum optimalnya potensi pajak daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung.

Faktor Penghambat:

1. Kualitas dan penempatan SDM
 - Masih kurangnya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
 - Belum sempurnanya KPI ("*Key Performance Indicators*") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal;
2. Sarana dan prasarana
 - Masih ada Gedung UPT masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga belum berfungsi secara optimal dikarenakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyankab Kota Bandung tidak bisa memenuhi gedung UPT yang layak untuk melayani pembayaran pajak;
3. Belum adanya *grand design* dan *road map* Pengelolaan Pajak Daerah sebagai acuan dan arah pengelolaan pajak daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyankab Kota Bandung;
4. Belum optimalnya data potensi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dinas;
5. Belum maksimalnya tugas dan fungsi penilaian kewajaran pembayaran pajak *self assessment*;
6. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang;
7. Belum optimalnya pengelolaan piutang pajak daerah;

Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong

1. Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah;
2. Tersedianya regulasi yang berkaitan dengan penguatan pengelola pajak daerah;

3. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha yang tinggi;
4. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dan SDM yang memadai;
5. Tersedianya Data Base Potensi Pajak Daerah;
6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL 2.3

**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ DISYANJAK KOTA BANDUNG**

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2016				CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan Pajak Daerah dan IKM untuk meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Disyajak	4 Dokumen , 10 Kegiatan Opu, 100%	3,276,000,000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan Pajak Daerah dan IKM untuk meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	4 Dokumen , 10 Kegiatan Opu, 100%	2,797,118,900	
1	Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Disyajak	1 Dokumen	428,000,000	Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1 Dokumen	559,800,000	

2	Kegiatan Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen	Jumlah pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Disyajak	2 Sistem	0	Kegiatan Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen	Jumlah pengembangan Sistem Informasi Manajemen	-	0
3	Kegiatan Data Base Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Pajak Daerah	Disyajak	5 Dokumen	0	Kegiatan Data Base Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Pajak Daerah	-	0
4	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Piutang	Terselesaikannya penyajian data piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak BPHTB	Disyajak	100 %	558,000,000	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Piutang	Persentase terpenuhinya administrasi penyelesaian piutang dan terlayannya administrasi BPHTB	100 %	485,000,000
5	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan	Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Disyajak	10 Kegiatan Operasi Terpadu	1,590,000,000	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan	Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB	10 Kegiatan Operasi Terpadu	1,008,700,000
6	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Daerah	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Daerah	Disyajak	2 Dokumen	700,000,000	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah dokumen background paper dan draft Peraturan Wali Kota	6 Dokumen	743,618,900
7	Kegiatan Peningkatan Penerimaan Pajak Penetapan melalui teknologi informasi	Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Disyajak	6 Dokumen	0	Kegiatan Peningkatan Penerimaan Pajak Penetapan melalui teknologi informasi	Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	6 Dokumen	0

II	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dengan merencanakan dan mengembangkan pengelolaan pajak daerah	Disyajak	5 Dokumen , 3 Unit, 1 Tahun	12,514,006.000	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dengan merencanakan dan mengembangkan pengelolaan pajak daerah	5 Dokumen , 3 Unit, 1 Tahun	11,884,513,500	
8	Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannya	Tersusunnya masterplan dan road map penerimaan pajak daerah	Disyajak	1 Dokumen	300,000,000	Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannya	Jumlah dokumen grand design dan road map perencanaan pajak daerah	1 Dokumen	307,175,000	
9	Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan	Tersusunnya kajian NJOP klasifikasi PBB per kelurahan	Disyajak	1 Dokumen	4,725,000,000	Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan	Tersusunnya kajian NJOP klasifikasi PBB per kelurahan dan dokumen pemutakhiran data PBB	1 Dokumen	4,918,500,000	
10	Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Terlaksananya penyebaran informasi pajak daerah	Disyajak	10 Kecamatan	2,650,000,000	Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Presentase terselenggaranya kegiatan sosialisasi perpajakan	100 %	2,577,900,000	
11	Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak	Disyajak	1 Dokumen	127,950,000	Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak	1 Dokumen	127,950,000	
12	Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak	Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah	Disyajak	70%	725,536,000	Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak	Presentase wajib pajak yang ditindak berdasarkan nota pengantar	70%	710,200,000	

13	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah	Disyajak	1 Dokumen	252,000,000	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah kajian metode perhitungan potensi pajak daerah dan pengembangan aplikasi pengelola data dan potensi pajak daerah	2 Dokumen	237,000,000	
14	Kegiatan Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen masterplan visualisasi data pajak daerah yang terintegrasi dalam tabulasi, grafik, peta dan data potensi lainnya	Disyajak	1 Dokumen	250,000,000	Kegiatan Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen masterplan visualisasi data pajak daerah yang terintegrasi dalam tabulasi, grafik, peta dan data potensi lainnya	1 Aplikasi	206,063,500	
15	Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Data PBB	Terbangunnya aplikasi verifikasi dan pengelolaan serta visualisasi pemutakhiran PBB sesuai dengan SOP dan Pelayanan perangkat bergerak (mobile)	Disyajak	-	-	Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Data PBB	Terbangunnya aplikasi verifikasi dan pengelolaan serta visualisasi pemutakhiran PBB sesuai dengan SOP dan Pelayanan perangkat bergerak (mobile)	-	-	
16	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah Kajian dan Aplikasi Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	Disyajak	1 Dokumen, 6 Aplikasi	2,528,500,000	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah Kajian dan Aplikasi Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	1 Dokumen, 8 Aplikasi	2,242,405,000	

17	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	Disyajak	600 WP	559,400,000	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	70 %	197,450,000	
19	Kegiatan Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran	Persentase pelayanan terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan verifikasi otorisasi pembukuan pajak pendaftaran	Disyajak	100 %	395,620,000	Kegiatan Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran	Jumlah rekapan laporan kegiatan VOP Pajak Pendaftaran	12 Laporan	359,870,000	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai kewajaran laporan keuangan SKPD dan Nilai Lakip		1 Dokumen	162,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai kewajaran laporan keuangan SKPD dan Nilai Lakip	100 %	156,800,000	
20	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Disyajak	Disyajak	1 Dokumen	162,000,000	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Disyajak	100 %	156,800,000	
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Disyajak	2 Dokumen	177,600,000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	150,400,000	
21	Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan	Tersusunnya Dokumen Renja dan Pelaporan Program Kegiatan Disyajak	Disyajak	2 Dokumen	177,600,000	Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Disyajak	2 dokumen	150,400,000	

IV	Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana dan kearsipan	Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan	Disyajak	1 Dokumen	0	Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan	1 Dokumen	0
20	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak	Disyajak	1 Dokumen	0	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	terpeliharannya dokumen/arsip pada bidang pajak penetapan	1 Dokumen	0
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Disyajak	41 Dokumen 100%	10,156,317,426	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	41 Dokumen 100%	10,791,249,656
21	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersampainya surat menyurat kepada Wajib Pajak	Disyajak	-	0	Penyediaan jasa surat menyurat	tersampainya surat menyurat kepada wajib pajak	-	0
22	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	Disyajak	100%	250,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersediannya sarana komunikasi,air dan listrik	100%	240,000,000
23	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disyajak	100%	89,000,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase tersedianya ruangan kantor disyajak	100%	102,500,000.00
24	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK	Disyajak	100%	2,409,200,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Presentase terpenuhinya jasa servis,suku cadang, BBM, Pelumas dan jasa STNK untuk 3 Bis pelayanan, 24 roda empat, 149 roda dua	100%	3,410,000,000
25	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak	Disyajak	100%	775,000,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak	100% pertahun	712,000,000.00

26	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Disyanjak	100%	200,000,000	Penyediaan alat tulis kantor	tersediannya ATK Disyanjak	100%	224,000,000	
27	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak	Disyanjak	100%	210,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersediannya cetakan sebagai sarana administrasi perkantoran	100%	355,600,000	
28	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak	Disyanjak	100%	127,900,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersediannya instalasi listrik dan peralatan listrik di Disyanjak	100%	279,300,000	
29	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak	Disyanjak	100%	4,825,497,426	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak	100%	5,380,358,926	
30	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor Disyanjak	Disyanjak	100%	252,400,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersediannya peralatan rumah tangga Disyanjak	100%	452,700,000	
31	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak (majalah dan surat kabar serta buku)	Disyanjak	100%	182,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan Disyanjak (surat kabar dan majalah)	100%	170,500,000	
32	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ ruang pertemuan untuk kegiatan rapat	Disyanjak	100%	150,000,000	Penyediaan makanan dan minuman	tersediannya makanan dan minuman dan gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat	100%	185,002,100	

33	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain	Disyanjak	100%	400,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersediannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain	100%	550,000,000	
34	Belanja jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak	Disyanjak	100%	285,320,000	Belanja jasa pengamanan kantor	tersediannya jasa pengamanan kantor	100%	281,920,000	
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas, kapasitas, saran dan prasarana aparatur		13 Dokumen	1,508,650,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas, kapasitas, saran dan prasarana aparatur	13 Dokumen	1,575,350,000	
35	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional disyanjak	Disyanjak	100%	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional disyanjak	100%	300,000,000	
36	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair Disyanjak dan kantor upp	Disyanjak	100%	0	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair Disyanjak dan kantor upp	100%	75,000,000	
37	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak	Disyanjak	100%	933,650,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharannya gedung Disyanjak, gedung kantor PBB, kantor UPP Disyanjak	100%	926,350,000	
38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Disyanjak	100%	200,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	199,000,000	
39	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terpeliharanya meubelair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP	Disyanjak	100%	75,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	terpeliharannya meubelair kantor Disyanjak dan kantor UPP	100%	75,000,000	

VII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS	Disyanjak	3 Dokumen	356,600,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS	3 Dokumen	538,200,000	
40	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disyanjak	3 Dokumen	356,600,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	538,200,000	
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang memiliki kopotensi sesuai bidangnya	Disyanjak	4 Dokumen	366,600,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang memiliki kopotensi sesuai bidangnya	100%	538,200,000	
41	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak	Disyanjak	100%	203,000,000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	tersosialisasikannya peraturan perundang perundangan pajak daerah	100%	171,900,000	
42	Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS Disyanjak	Disyanjak	100%	1,235,300,000	Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS Disyanjak	100%	1,284,800,000	
TOTAL					29,589,473,426				29,375,332,056	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

Nama PD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyanjak Kota Bandung

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
NON URUSAN					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak	100%	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Disyanjak
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Persentase tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	100%	
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Persentase tersedianya ruangan kantor disyanjak	100%	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Persentase Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK untuk 3 Bis, 26 Roda empat dan 149 roda dua	100% pertahun	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak	100% pertahun	
5	Penyediaan alat tulis kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya alat tulis Dinas Pelayanan Pajak	100%	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya cetakan sebagai sarana administrasi perkantoran	100%	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak	100%	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak	100%	
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya bahan bacaan Disyanjak (surat kabar dan majalah)	100%	
11	Penyediaan makanan dan minuman	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya makanan dan minuman di gedung/tempat/ruang pertemuan rapat	100%	

12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain	100%	
13	Belanja jasa pengamanan kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya jasa pengamanan kantor	100%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Lancarnya operasional Disyanjak	100%	
15	Pengadaan mebeulair	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya meubelair	100%	
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak	100%	
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	
18	Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP	100%	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	100%	Meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan PNS di lingkungan Disyanjak
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	100%	Meningkatnya kompetensi PNS di lingkungan Disyanjak
20	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersosialisasikannya peraturan perundang undangan pajak daerah	4 Dokumen, 100%	
21	Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter	100%	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	100%	Tersedianya Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan SKPD
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Tersusunnya LKIP disyanjak tahun 2015	100%	

URUSAN WAJIB					
VI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	100%	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk meningkatkan PAD
23	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah dokumen background paper dan draft Peraturan Wali Kota	5 Dokumen	
24	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Dokumen laporan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir fasilitas penyelenggaraan pelayanan penertiban NPWPD	100%	
25	Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Persentase terpenuhinya administrasi penyelesaian piutang dan terlayannya administrasi BPHTB	100%	
26	Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Terselenggaranya kegiatan Operasi Terpadu PBB dan terselesaikannya piutang PBB	10 Kegiatan operasi terpadu	
VII	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	100%	Tersusunnya kajian dan perumusan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah
27	Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannya	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah dokumen grand design dan road map perencanaan Pajak Daerah	1 Dokumen	
28	Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah dokumen kajian Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan dan dokumen pemutakhiran data	2 Dokumen	
29	Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Persentase terselenggaranya kegiatan sosialisasi perpajakan	100%	
30	Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah dokumen survey kepuasan WP atas pelayanan pajak	1 Dokumen	
31	Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Persentase wajib pajak yang ditindak berdasarkan nota pengantar	70%	
32	Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah kajian metode perhitungan potensi pajak dan pengembangan aplikasi pengelolaan data dan potensi pajak daerah	2 Dokumen	

33	Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah aplikasi masterplan visualisasi data pajak daerah yang terintegrasi dalam tabulasi, grafik, peta dan data potensi lainnya	1 Aplikasi	
34	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah aplikasi kebijakan komunikasi dan informasi pajak daerah	7 Aplikasi	
35	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah wajib pajak diperiksa	70%	
36	Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah rekapan laporan kegiatan VOP pajak pendaftaran	12 Laporan	
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Presentase ketercapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	100%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Disyajak
37	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	DISYANJAK KOTA BANDUNG	Jumlah dokumen perencanaan disyajak	2 Dokumen	

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Disyajak Kota Bandung, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi BPPD Kota Bandung dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018

a. Tujuan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dalam pencapaian tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung menuju **BANDUNG JUARA**, Sesuai dengan **Visi** Kota Bandung Tahun 2014-2018 “**Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera**” atau mewujudkan yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan Rencana Kerja antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi PD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;

2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan penjelasan visi, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ke dalam misi untuk tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan :
 - a) Optimalisasi pengelolaan pajak daerah;
 - b) Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan: Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

b. Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran atas Misi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan:

- a. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dengan sasarannya adalah:
- Tercapainya target Pendapatan Pajak Daerah dengan Indikator Sasaran Jumlah penerimaan pajak daerah:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Parkir
 5. Pajak BPHTB
 6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 7. Pajak Reklame
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah dengan indikator sasaran: Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah.
- b. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah dengan sasarannya adalah Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah dengan indikator sasarannya adalah Tercapainya Kegiatan Koordinasi, Konfirmasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah.
2. Sasaran atas Misi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan Tujuan Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan Sasarannya adalah: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pajak Daerah dengan Indikator Sasarannya adalah
- a. Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Nilai Evaluasi AKIP BPPD oleh Inspektorat.

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah.	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah :
		1. Pajak Hotel
		2. Pajak Restoran
		3. Pajak Hiburan
		4. Pajak Parkir
		5. Pajak BPHTB
		6. PPJ
		7. Pajak Reklame
		8. Pajak Air Tanah
2.	Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah.	9. PBB
		Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah
3.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bukan Pajak Daerah.	Tercapainya Kegiatan Koordinasi, Konfirmasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah.
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah
		Nilai Evaluasi AKIP BPPD oleh Inspektorat

3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2018

Adapun target Pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.429.000.000.000,- yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak seperti terlihat dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Proyeksi Target Pendapatan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2018

Jenis Pajak		Target (Rp)
1	Pajak Hotel	300.000.000.000
2	Pajak Restoran	255.000.000.000
3	Pajak Hiburan	100.000.000.000
4	Pajak Parkir	32.500.000.000
5	PPJ	180.000.000.000
6	BPHTB	684.000.000.000
7	Pajak Air Tanah	37.500.000.000
8	Pajak Reklame	240.000.000.000
9	PBB	600.000.000.000
Jumlah		2.429.000.000.000

3.3 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam strategi, selanjutnya dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya.

Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi.

Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Spesifik
- Terukur
- Agresif
- Berorientasi kepada hasil
- Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam RPJMD 2013-2018 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

Program Urusan Wajib :

- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;
- (3) Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah.

Program Non Urusan :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Adapun untuk merealisasikan program-program tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Kegiatan Tahun 2018
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		11,220,915,024.00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	Jasa Bulanan	326,450,038.00
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK	Unit	1,906,407,020.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor BPPD dan UPT	Jasa Bulanan	797,254,200.00
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Paket	965,142,169.00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran BPPD dan UPT	Jenis	1,153,468,264.00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik dan Peralatan Listrik di kantor BPPD dan UPT	Jenis	145,433,826.00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor BPPD dan UPT	Unit	1,965,005,607.00

8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga BPPD dan UPT	Jenis	184,471,100.00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan pada BPPD (majalah dan surat kabar)	Jenis	41,754,000.00
10	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan logistik kantor	Jenis	225,211,800.00
11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan, rapat dan tamu	Laporan	1,207,319,000.00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi BPPD dengan instansi lain	Laporan	1,949,238,000.00
13	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor BPPD	Jasa Bulanan	353,760,000.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas, kapasitas, sarana dan Prasarana Aparatur BPPD		1,947,045,758.00
14	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeulair BPPD dan UPT	Unit	337,936,060.00
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung BPPD dan Kantor UPT	Unit	249,015,702.00
16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	199,705,000.00
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	Terpeliharanya mebeulair Kantor BPPD dan Kantor UPT	Unit	61,655,000.00
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya rehabilitasi gedung kantor BPPD dan UPT	Unit	1,098,733,996.00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur BPPD		327,250,000.00
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Unit	327,250,000.00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		606,200,000.00
20	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasikannya Peraturan perundangan Pajak Daerah bagi ASN BPPD	Kali	90,480,000.00
21	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter ASN BPPD	Kali	515,720,000.00

V	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2,429 T	1,365,551,600.00
22	Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	- Jumlah aplikasi penetapan target pajak daerah - Jumlah aplikasi Pengembangan perhitungan potensi pajak daerah - Jumlah aplikasi pengembangan visualisasi pengelolaan data dan potensi pajak daerah	- 1 Aplikasi - 1 Aplikasi - 1 Aplikasi	184,838,500.00
23	Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Raperwal tentang Pemungutan Pajak Daerah	1 Raperwal	249,060,600.00
24	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen appraisal Pajak Reklame dan PAT	1 Dokumen	216,000,000.00
25	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen appraisal PBB	1 Dokumen	236,000,000.00
26	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah dokumen appraisal Pajak BPHTB	10 Dokumen	250,000,000.00
VI	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2,429 T	4,189,223,000.00
27	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah iklan layanan masyarakat mengenai Pajak Daerah melalui berbagai media	(1 TV Lokal, 22 Radio, 40 kali tayangan Koran, sosialisasi tatap muka)	2,875,823,000.00
28	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pengaduan dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah di Media Cetak	20 kali	798,600,000.00
29	Kegiatan Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak	Jumlah tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan daerah	4 kali	514,800,000.00

VII	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2,429 T	4,232,347,140.00
30	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah aplikasi pelayanan pendapatan daerah - Jumlah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pelayanan pajak daerah	- 2 Aplikasi - 4 Aplikasi	4,097,981,040.00
31	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak daerah	1 Dokumen	134,366,100.00
TOTAL BELANJA LANGSUNG				23,888,532,522.00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 merupakan penjabaran proses perencanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang kemudian disesuaikan dengan Reviu Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 dan Reviu Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017, dimana proses perencanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Badan mempunyai 2 (dua) Sasaran yaitu : Pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dilingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kota Bandung yang tertuang dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan bagian dari rencana aksi dan tindak lanjut dari isu-isu atau permasalahan yang terjadi di tahun 2017, yaitu;

1. Belum maksimalnya data potensi yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Penetapan besaran beberapa mata pajak oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung masih bergantung pada Instansi lain.
3. Adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Instansi/PD lain yang mempengaruhi pada besaran pajak Daerah
4. Belum optimalnya sinergitas data antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang dapat mempercepat proses pembayaran oleh WP
5. Pajak BPHTB merupakan penerimaan pajak hasil dari transaksi jual/beli property yang tidak bisa diprediksi.
6. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak
7. Belum optimalnya layanan pajak daerah meliputi fasilitas dan prasarana layanan pajak
8. Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan transparansi pajak yang berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanann perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk meminimalis permasalahan yang dihadapi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung akan merealisasikan program-program kegiatan yang mendukung perbaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan melaksanakan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah, Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah dan Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 6 (enam) program, 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 3.4 dengan perencanaan target pendapatan sebesar Rp. 2.429.000.000,- sebagaimana terlampir pada tabel 3.2.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhoinya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Amin

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 198603 1 006**

Tabel 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA BANDUNG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 (RKPD 2018)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN WAJIB									
A	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	BPPD	2,429 T	1.365,551,600.00	APBD		2,429 T	1.502,106,760.00
1	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	- Jumlah aplikasi penetapan target pajak daerah - Jumlah aplikasi pengembangan perhitungan potensi pajak daerah - Jumlah aplikasi pengembangan visualisasi pengelolaan data dan potensi pajak daerah	BPPD	- 1 Aplikasi - 1 Aplikasi - 1 Aplikasi	184,838,500.00	APBD		-	203,322,350.00
2	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak daerah	Jumlah Raperwal tentang Pemungutan Pajak Daerah	BPPD	1 Raperwal	249,060,600.00	APBD		1 Raperwal	273,966,660.00
3	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah dokumen appraisal pajak BPHTB	BPPD	10 Dokumen	154,502,500.00	APBD		-	169,952,750.00

4	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen appraisal pajak reklame dan PAT	BPPD	1 Dokumen	214,500,000.00	APBD		1 Dokumen	235,950,000.00
5	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah dokumen appraisal PBB	BPPD	1 Dokumen	562,650,000.00	APBD		1 Dokumen	618,915,000.00
B	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	BPPD	75%	4,189,223,000.00	APBD		-	-
6	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah iklan layanan masyarakat mengenai pajak daerah melalui berbagai media	BPPD	4 Media	2,875,823,000.00	APBD		-	-
7	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah pelayanan pengaduan dan pembinaan wajib pajak daerah di media cetak	BPPD	20 Kali	798,600,000.00	APBD		20 kali	878,460,000.00
8	Kegiatan Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak	Jumlah tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pajak	BPPD	4 Kali	514,800,000.00	APBD		4 Kali	566,280,000.00
C	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	BPPD	86	4,232,347,140.00	APBD		-	-
9	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah aplikasi pelayanan pendapatan daerah - Jumlah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pelayanan pajak daerah	BPPD	- 2 Aplikasi - 4 Aplikasi	4,097,981,040.00	APBD		-	-
10	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak daerah	BPPD	1 Dokumen	134,366,100.00	APBD		-	-

NON URUSAN									
D	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan administrasi perkantoran bulanan	BPPD	Laporan Bulanan	11,220,915.024.00	APBD		Laporan Bulanan	-
11	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	BPPD	Jasa bulanan	326,450,038.00	APBD		Jasa bulanan	359,095,042.00
12	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang dikelola	BPPD	Unit	1,906,407,020.00	APBD		Unit	2,097,047,722.00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	BPPD	Jasa bulanan	797,254,200.00	APBD		Jasa bulanan	876,979,620.00
14	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan ATK	BPPD	Paket	964,112,174.00	APBD		Paket	1,060,523,391.00
15	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	BPPD	Jenis	1,153,468,264.00	APBD		Jenis	1,268,815,090.00
16	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	BPPD	Jenis	145,433,826.00	APBD		Jenis	159,977,209.00
17	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	BPPD	Unit	1,949,759,607.00	APBD		Unit	2,144,735,568.00
18	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	BPPD	Jenis	184,471,100.00	APBD		-	-
19	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan	BPPD	Jenis	41,754,000.00	APBD		Jenis	45,929,400.00
20	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	BPPD	Laporan	1,207,319,000.00	APBD		-	-

21	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPPD	Laporan	1,949,238,000.00	APBD		-	-
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	BPPD	Jasa bulanan	353,760,000.00	APBD		Jasa bulanan	389,136,000.00
23	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	BPPD	Jenis	225,211,800.00	APBD		Jenis	235,632,980.00
E	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dan ditingkatkan	BPPD	Unit	1,947,045,758.00	APBD		-	-
24	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah unit pengadaan mebeulair	BPPD	Unit	337,936,060.00	APBD		-	-
25	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPD	Unit	249,015,702.00	APBD		Unit	271,503,322.00
26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	BPPD	Unit	199,705,000.00	APBD		Unit	219,675,500.00
27	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	Jumlah unit mebeulair terpelihara	BPPD	Unit	61,655.000.00	APBD		-	-
28	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah unit rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BPPD	Unit	1,098,733,996.00	APBD		-	-
F	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas sesuai aturan	BPPD	Orang	327,250,000.00	APBD		Orang	359,975,000.00
29	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	BPPD	Unit	327,250,000.00	APBD		Unit	359,975,000.00

G	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya	BPPD	Orang	606,200,000.00	APBD		-	-
30	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan	BPPD	Orang	90,480,000.00	APBD		-	-
31	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	BPPD	Orang	515,720,000.00	APBD		Orang	567,292,000.00
TOTAL BELANJA LANGSUNG					23,888,532,522.00				-